

Bab 4.

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu strategis didasarkan pada pertimbangan tentang keterkaitan dengan isu strategis nasional dan Provinsi Papua, dampak yang signifikan terhadap peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta keterkaitan dengan janji politik Bupati dan Wakil bupati pada periode 5 (lima) tahun. Dalam menentukan isu strategis dalam dokumen perencanaan harus terukur baik dari sisi kewenangan, kemampuan pendanaan, kapasitas pelaksana atau sumberdaya manusia dan sumberdaya pendukung lainnya serta jangka waktu pencapaiannya. Berdasarkan kondisi permasalahan yang ada serta melihat cakupan dari dampak permasalahan tersebut maka dapat dilaksanakan analisis untuk menentukan isu-isu strategis yang terjadi saat ini dan diperkirakan masih relevan menjadi isu strategis sampai dengan tahun periode akhir masa jabatan bupati dan wakil bupati (2016-2021).

Memasuki usianya yang ke- 14 pada tahun 2017, Kabupaten Supiori terus berbenah diri untuk kemajuan dalam mensejahterakan masyarakatnya, melalui program pembangunan yang terarah, terencana, sistematis dan sinergis. Indikator pembangunan pada 5 tahun terakhir menunjukkan kemajuan di berbagai aspek kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu ukuran kesejahteraan menunjukkan peningkatan. Sejumlah tantangan pembangunan masih dihadapi ke depan dan perlu penanganan lebih baik. Permasalahan pembangunan yang akan dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Supiori secara umum, adalah bagaimana membangun pengembangan wilayahnya melalui peningkatan akses infrastruktur, masyarakat yang berkarakter, mengembangkan budaya dan kearifan lokal, melakukan reformasi birokrasi dan penegakan hukum, mengembangkan SDM yang berdaya saing, pengentasan kemiskinan, pengembangan konektivitas antar wilayah dan tata ruang, serta pengelolaan lingkungan hidup.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

4.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

4.1.1.1 Urusan Pendidikan

Permasalahan pembangunan bidang urusan pendidikan antara lain: Masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masyarakat Supiori tahun 2014 yaitu 8,11 tahun berdasarkan metode perhitungan baru IPM ; masih banyaknya masyarakat usia 15 tahun keatas yang buta huruf. berdasarkan data BPS Pusat Angka Melek Huruf masyarakat Supiori baru mencapai 96,68%; masih terdapat anak putus sekolah SD/MI SMP/MTs ke SMA/SMK/MA; masih terdapat sarana dan prasarana sekolah yang dalam kondisi rusak dan kurang memadai; masih rendahnya kualitas pendidikan non formal dan informal; masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi; masih kurangnya insentif bagi tenaga pendidik terutama di daerah terpencil/terisolir; belum memadainya ketersediaan sumberdaya manusia terutama tenaga pengajar untuk pendidikan dasar dan pendidikan khusus; belum berkembangnya bidang pendidikan kejuruan yang terkait dengan keunggulan potensi daerah, khususnya di bidang kelautan perikanan, pariwisata dan pertanian; belum memadainya relevansi dan daya saing pendidikan menengah umum dan khusus; dan belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan karakter berbasis moral, budi pekerti dan budaya lokal.

4.1.1.2 Urusan Kesehatan

Permasalahan pembangunan bidang urusan kesehatan antara lain: Masih tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) karena belum memadainya pelayanan kesehatan ibu dan anak; Tingginya penyakit menular dan tidak menular antara lain: TB, ISPA, Penyakit pada Sistem Otot & Jaringan Pengikat, Vulnus, Gastritis, Obsfebris, Diare, Kecacingan, Anoreksia, Penyakit Kulit karena Jamur dan Malaria Klinis; Keterbatasan sarana, prasarana dan keterbatasan Sumber Daya Manusia; masih terbatas perilaku di masyarakat untuk

melaksanakan perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih rendah; penduduk miskin masih belum seluruhnya mendapatkan Jaminan Kesehatan; masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat, yang ditandai dengan rendahnya Indeks Kesehatan Pelayanan Masyarakat (IPM); rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup sehat; dan belum memadainya upaya kesehatan lingkungan.

4.1.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pembangunan bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain: Keterbatasan infastruktur dasar seperti jalan, jembatan pelabuhan dan sarana serta prasarana pemerrintahan; belum terkoordinasinya secara komprehensif antar SKPD dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur; adanya potensi banjir rob, tanah longsor, abrasi pantai, kebakaran hutan yang sering kali menjadi momok bagi wilayah-wilayah daratan dan pesisir Kabupaten Supiori; belum memadainya kapasitas sarana dan prasarana transportasi masuk dan keluar wilayah Supiori sehingga seringkali mengganggu kelancaran arus barang dan jasa yang berakibat pada tingginya harga-harga barang; belum memadainya sarana dan prasarana sumberdaya air yang mengakibatkan rendahnya produktifitas pertanian; belum memadainya kuantitas dan kualitas jalan; belum efektifnya penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian) yang berjalan secara komprehensif; dan terdapat keterbatasan sarana dan prasarana pengembangan kawasan perbatasan.

4.1.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pembangunan bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman antara lain: masih belum tertatanya kawasan permukiman penduduk dan infrastruktur penunjangnya; masih perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya

pembangunan sanitasi lingkungan permukiman yang baik; pelayanan air bersih belum optimal (menyeluruh); penataan dan pengelolaan sanitasi lingkungan permukiman masih rendah; infrastruktur jalan lingkungan atau jalan kampung yang kondisinya belum memadai; masih banyaknya daerah-daerah permukiman kumuh yang belum tertata dengan baik; masih adanya jumlah penduduk yang belum memiliki rumah yang layak untuk ditinggali; dan adanya keterbatasan lahan permukiman yang disebabkan oleh kondisi fisik wilayah sebagian besar kawasan lindung.

1.1.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.

Permasalahan pembangunan bidang urusan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat antara lain: masih rendahnya kesadaran hukum dan penegakan hukum oleh aparat; pemahaman tentang Perda di masyarakat belum merata; keamanan dan kenyamanan lingkungan masih perlu ditingkatkan; jiwa nasionalisme dan patriotisme cenderung menurun; masih rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu; masih adanya potensi dan gangguan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara; belum memadainya kesadaran bela negara pada masyarakat; belum optimalnya mitigasi bencana bagi daerah-daerah yang memiliki kerawanan bencana; belum memadainya kapasitas sumberdaya manusia di bidang mitigasi bencana; dan keterbatasan sarana dan prasarana penanganan bencana.

1.1.1.6 Urusan Sosial

Permasalahan pembangunan bidang urusan sosial antara lain: jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) cukup tinggi; tingkat kepedulian masyarakat terhadap penanganan masalah-masalah sosial masih perlu ditingkatkan; masih tingginya jumlah penduduk yang berada dalam kondisi kemiskinan; dan keterbatasan sarana dan prasarana pengembangan sosial masyarakat.

4.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

4.1.2.1 Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan pembangunan bidang urusan tenaga kerja antara lain: tingginya tingkat pengangguran terbuka (19,24% tahun 2014) yang didominasi lulusan SLTA ke bawah; masih minimnya peluang kerja sehingga orientasi masyarakat lebih banyak bekerja diluar Kabupaten Supiori; perlindungan ketenagakerjaan masih perlu ditingkatkan; kualitas dan kompetensi angkatan kerja masih perlu ditingkatkan; kurang berkembangnya lapangan pekerjaan baik sektor formal maupun informal; adanya potensi konflik perburuhan diantara penduduk lokal dan pendatang; dan belum memadainya kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja terutama penduduk asli Kabupaten Supiori.

4.1.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Permasalahan pembangunan bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain: rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan; rendahnya kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; belum terlaksananya pengarusutamaan gender dalam pembangunan; masih adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak; dan masih terjadinya diskriminasi perempuan dan anak.

4.1.2.3 Urusan Pangan.

Permasalahan pembangunan bidang urusan pangan antara lain: ketersediaan pangan belum tercukupi karena keterbatasan lahan pertanian dan SDM; masih rendahnya insensitas penyuluhan, tata kerja dan metode/teknologi serta materi penyuluhan sesuai kebutuhan petani–nelayan; distribusi dan akses pangan atau

keterjangkauan belum optimal; dan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan lokal cenderung menurun.

4.1.2.4 Urusan Pertanahan

Permasalahan pembangunan bidang urusan pertanahan antara lain: belum optimalnya penataan tanah ulayat dan prosedur pelepasan tanah ulayat yang bermaslah; tanah milik masyarakat masih banyak yang belum bersertifikat; masih banyaknya aset kampung dan tanah adat yang belum bersertifikat; tanah milik kampung/adat masih banyak digunakan untuk fasilitas Pemerintah Daerah baik digunakan sebagai sarana pendidikan, kesehatan dan lainnya sehingga perlu penertiban administrasi dalam penggunaannya; tanah milik Pemerintah Daerah masih banyak yang belum bersertifikat atas nama Pemerintah Daerah; aset milik Pemerintah Daerah berupa tanah yang belum mak simal sesuai peruntukannya; dan masih banyaknya konflik pertanahan.

4.1.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan pembangunan bidang urusan lingkungan hidup antara lain: Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup; sarana dan prasarana pengendalian dan pengelolaan lingkungan sangat terbatas; regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup di daerah belum lengkap; kualitas lingkungan hidup cenderung mengalami penurunan; keanekaragaman hayati (flora dan fauna) semakin berkurang; Kesadaran masyarakat umum dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup masih rendah; terjadinya ancaman erosi, abrasi dan pengelolaan pesisir yang dapat mengakibatkan penurunan muka tanah; mulai tingginya pencemaran dan kerusakan lingkungan; Adanya galian mineral non logam (galian c) yang mengancam kelestarian lingkungan (penambangan liar); dan kajian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum optimal.

4.1.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pembangunan bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil antara lain: Masih banyaknya warga yang belum memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga), Akta Kelahiran sesuai ketentuan; Data Lahir, kematian dan perpindahan belum dilaksanakan secara optimal; dan belum tertatanya administrasi kependudukan secara baik;

4.1.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pembangunan bidang urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain: Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat kampung yang belum optimal; partisipasi masyarakat dan kelompok masyarakat dalam pembangunan kampung belum optimal; pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan belum optimal; pelayanan pemerintahan kampung kepada masyarakat belum optimal; pengelolaan perencanaan dan pengawasan keuangan kampung dalam pembangunan masih perlu ditingkatkan; pengelolaan administrasi pemerintahan kampung belum tertib; akses masyarakat terhadap informasi mengenai program pemberdayaan masyarakat dan program pembangunan secara umum masih kurang dan terbatas; Teknologi Tepat Guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal; belum terbentuknya Badan Usaha Masyarakat Kampung sebagai wadah perekonomian masyarakat kampung; masih kurangnya kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah kampung; belum memadainya partisipasi berbagai golongan masyarakat dalam pembangunan daerah; belum optimalnya kapasitas sumberdaya manusia di bidang pemberdayaan masyarakat; kurang optimalnya aktualisasi budaya gotong royong masyarakat; dan belum berkembangnya suatu program stimulasi untuk pemberdayaan potensi yang dimiliki oleh masyarakat.

4.1.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pembangunan bidang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana antara lain: Masih adanya pernikahan usia dini dan angka perceraian; penggunaan alat kontrasepsi yang masih rendah; rendahnya pemahaman masyarakat terhadap keluarga kecil dan sejahtera; dan masih terbatasnya jumlah dan kualitas petugas penyuluh Keluarga Berencana.

4.1.2.9 Urusan Perhubungan.

Permasalahan pembangunan bidang urusan pangan antara lain: Belum optimalnya sarana transportasi dan fasilitas umum transportasi serta jaringan prasarana darat dan laut; belum terintegrasinya moda transportasi darat dan laut; terbatasnya sarana prasarana transportasi umum yang menjangkau seluruh wilayah kampung; belum memadainya moda transportasi darat darat laut; belum memadainya sarana dan prasarana perhubungan laut (dermaga/pelabuhan).

4.1.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pembangunan bidang urusan komunikasi dan informasi antara lain: rendahnya pemahaman dan penerapan Teknologi Informasi; belum optimalnya penyelenggaraan telekomunikasi khususnya operator seluler di wilayah terpencil; Rendahnya kualitas dan kuantitas akses teknologi dan informasi; masih rendahnya kapasitas jaringan telekomunikasi; dan terbatasnya sarana dan prasarana insfastruktur komunikasi dan informatika.

4.1.2.11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan pembangunan bidang urusan koperasi, usaha kecil dan menengah antara lain: Rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola Koperasi dan UMKM; rendahnya Kualitas dan daya saing produk UKM dan kelembagaan koperasi; kurangnya

sosialisasi pada masyarakat terhadap kelembagaan koperasi; rendahnya jiwa kewirausahaan di masyarakat; teknologi dan sarana usaha yang kurang memadai; aksesibilitas terhadap permodalan yang masih rendah; aksesibilitas terhadap pemasaran hasil UKM yang masih rendah; jaringan usaha belum terbentuk secara kuat; adanya ancaman persaingan ekonomi kerakyatan dengan investor besar yang berasal dari luar; rendahnya inisiatif berusaha dalam bidang perdagangan pada penduduk lokal; belum optimalnya upaya pembinaan UMKM; dan belum berkembangnya usaha-usaha kecil yang memanfaatkan potensi unggulan daerah.

4.1.2.12 Urusan Penanaman Modal

Permasalahan pembangunan bidang urusan penanaman modal antara lain: Rendahnya realisasi investasi; rendahnya kualitas sumber daya manusia pelayanan investasi dan perizinan; rendahnya pengawasan dan pengendalian pelayanan investasi dan perizinan; rendahnya promosi dan pemasaran produk-produk unggulan; masih lemahnya daya saing daerah; belum optimalnya upaya promosi investasi pada investor domestik maupun asing; belum memadainya infrastruktur daerah sehingga belum menarik minat investasi; dan belum adanya insentif dan disinsentif investasi.

4.1.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan pembangunan bidang urusan kepemudaan dan olahraga antara lain: Masalah sosial di kalangan pemuda seperti kriminalitas dan narkoba masih banyak; belum optimalnya peranan organisasi Kepemudaan dan Olah Raga dalam pembangunan; belum memadainya sarana dan prasarana pengembangan kreatifitas pemuda dan olah raga; rendahnya Jiwa kewirausahaan di kalangan pemuda; pemuda sebagai "agent of change" belum optimal; prestasi olah raga belum optimal; rendahnya pembinaan olah raga di kalangan pemuda; belum memadainya prestasi dan budaya olahraga; belum tergarapnya potensi dan partisipasi pemuda dalam

percepatan pembangunan; dan adanya kecenderungan budaya luar yang mempengaruhi moral para pemuda.

4.1.2.14 Urusan Statistik

Permasalahan pembangunan bidang urusan statistik antara lain: Pengelolapenyediaan dan pemanfaatan data statistik sektoral dalam penyediaan data yang akurat, tersinergi, dan terkini; dan rendahnya kesadaran seluruh stakeholder terhadap pentingnya pemanfaatan data statistik yang handal dan akurat di Kabupaten Supiori.

4.1.2.15 Urusan Persandian

Permasalahan pembangunan bidang urusan persandian antara lain: Belum optimalnya penyelenggaraan persandian, karena masih adanya keterbatasan sarana dan prasaran serta SDM yang belum memadai.

4.1.2.16 Urusan Kebudayaan

Permasalahan pembangunan bidang urusan kebudayaan antara lain: Belum diterapkannya secara optimal frase kovawes kuker airama (nilai-nalia luhur budaya local) dalam kehidupan sehari-hari; rendahnya pengelolaan, pelestarian dan promosi kekayaan budaya lokal; rendahnya partisipasi generasi muda dalam seni dan budaya; masuknya nilai dan budaya asing yang berpengaruh negatif; rendahnya kualitas sumberdaya manusia pelaku budaya; menurunnya kepedulian masyarakat terhadap masalah kebudayaan; dan terbatasnya sarana dan prasarana untuk pengembangan budaya.

4.1.2.17 Urusan Perpustakaan

Permasalahan pembangunan bidang urusan perpustakaan antara lain: belum tersedianya sarana, prasarana dan pengelolaan

perpustakaan yang memadai; kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pengelola perpustakaan belum memadai; dan rendahnya minat baca di masyarakat.

4.1.2.18 Urusan Kearsipan

Permasalahan pembangunan bidang urusan kearsipan antara lain: Pemahaman aparatur tentang pentingnya arsip masih kurang; pengelolaan arsip belum optimal; dan rendahnya sarana dan prasarana kearsipan.

4.1.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

4.1.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pembangunan bidang urusan kelautan dan perikanan antara lain: Rendahnya daya beli masyarakat nelayan; rendahnya PAD yang berasal dari sektor Kelautan dan Perikanan; belum maksimalnya hasil produksi Kelautan dan Perikanan; rendahnya komoditas hasil Kelautan dan Perikanan; belum optimalnya pelestarian ekosistem perairan umum; belum optimalnya petani pembudidaya ikan dan perikanan tangkap; terbatasnya akses permodalan kepada petani perikanan; belum tersedianya pelabuhan pendaratan ikan dan tempat pelelangan ikan yang modern dan higienis. Tebatasnya sarana dan prasarana serta SDM dalam pengembangan budidaya dan penangkapan ikan.

4.1.3.2 Urusan Pariwisata

Permasalahan pembangunan bidang urusan pariwisata antara lain: Belum optimalnya pengembangan potensi pariwisata yang tersedia baik di darat maupun di laut: rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia bidang Kepariwisata; belum memadainya sarana prasarana serta fasilitas pendukung kepariwisataan; rendahnya kreativitas, inovasi dan kompetensi daya saing masyarakat bidang pariwisata; rendahnya pengembangan manajemen pariwisata yang mendukung keberlanjutan pengembangan ekonomi lokal; belum

adanya keterpaduan dan sinergi antar pelaku wisata; rendahnya pengembangan produk/souvenir ciri khas obyek wisata; belum adanya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata; rendahnya kegiatan promosi pariwisata; dan belum adanya rencana induk pengembangan pariwisata.

4.1.3.3 Urusan Pertanian

Permasalahan pembangunan bidang urusan pertanian antara lain: Keterbatasan lahan pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan; rendahnya produk-produk pertanian; rendahnya kapasitas kelembagaan petani; rendahnya akses petani terhadap permodalan; belum dioptimalkan kawasan budidaya pertanian dalam RTRW; Rendahnya produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan; rendahnya pemanfaatan teknologi dalam peningkatan produksi dan pengolahan hasil pertanian dalam rangka agribisnis; terbatasnya sarana dan prasarana pertanian dan produksi pertanian; rendahnya stabilitas harga hasil produksi pertanian; rendahnya kemampuan dalam pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil produk pertanian; terbatasnya jaringan informasi pasar produk pertanian; belum optimalnya tata guna dan tata kelola air; dan terbatasnya kualitas dan jumlah penyuluh pertanian.

4.1.3.4 Urusan Perdagangan

Permasalahan pembangunan bidang urusan partanian antara lain: Belum memadainya infrastruktur sarana prasarana perdagangan dan sistem pendukung lainnya; belum optimalnya tata kelola pasar kabupaten, pasar distrik dan pasar kampung.

4.1.3.5 Urusan Perindustrian

Permasalahan pembangunan bidang urusan parindustrian antara lain: Industri yang sudah ada perlu penguatan secara menyeluruh di setiap lini dalam rangka pengembangan basis industri; belum

berkembangnya industri-industri baru berdasarkan potensi sumber daya dan kearifan lokal; pertumbuhan industri-industri baru berdasarkan potensi sumber daya dan kearifan local belum signifikan; inovasi dan kualitas produk masih belum bisa bersaing; sebagian bahan baku produksi tergantung pada daerah lain; keterbatasan saran dan prasarana serta SDM yang belum memadai.

4.1.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

4.1.4.1 Fungsi Sekretariat Daerah

Permasalahan pembangunan bidang urusan penunjang sekretariat daerah antara lain: Produk hukum daerah masih banyak yang belum sesuai dengan perkembangan keadaan serta tuntutan kebutuhan; SKPD belum semua memiliki Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur; belum optimalnya penerapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa; dan penerapan sistem administrasi pemerintahan daerah masih perlu ditingkatkan dan dioptimalisasi; dan masih terbatasnya sarana dan prasarana serta SDM peyelenggara pemerintahan.

4.1.4.2 Fungsi Sekretariat DPRD

Permasalahan pembangunan bidang urusan penunjang sekretariat DPRD antara lain: Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung operasional sekretariat DPRD; dan belum optimalnya SDM pendukung kegiatan administratif DPRD.

4.1.4.3 Inspektorat Daerah

Permasalahan pembangunan bidang inspektorat daerah antara lain: Terbatasnya SDM aparatur pendukung pengawasan atau auditor yang sesuai dengan kebutuhan; belum optimalnya sistem dan prosedur pengawasan; dan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengawasan.

4.1.4.4 Penunjang Pemerintahan Bidang Perencanaan Daerah

Permasalahan pembangunan bidang urusan penunjang bidang perencanaan antara lain: Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang perencanaan; terbatasnya SDM aparatur bidang perencanaan; rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang mulai tingkat kampung hingga tingkat kabupaten; belum sinkronnya antara dokumen perencanaan yang telah disusun dengan dokumen penganggaran; terbatasnya SDM aparatur perencana di setiap SKPD; belum terlaksananya pengelolaan data secara optimal, baik dalam kegiatan pengumpulan data maupun dalam pengelolaannya; hasil-hasil pengawasan atau pengendalian dan evaluasi pembangunan belum sepenuhnya menjadi input perencanaan pembangunan; dan belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

4.1.4.5 Fungsi Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan

Permasalahan pembangunan bidang urusan penunjang bidang keuangan antara lain: Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah; dan belum tergalinya potensi pendapatan daerah dalam rangka ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah.

4.1.4.6 Fungsi Penunjang Pemerintahan Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan pembangunan bidang urusan penunjang bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan antara lain: Pengadaan dan penempatan pegawai yang belum sesuai antara kebutuhan formasi dengan formasi pegawai sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku; kompetensi sebagian pegawai belum sesuai dengan kebutuhan riil; administrasi kepegawaian masih belum optimal; belum optimalnya analisis jabatan oleh Baperjakat.

4.1.4.7 Fungsi Penunjang Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan pembangunan bidang urusan penunjang bidang penelitian dan pengembangan antara lain: Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan belum berjalan secara optimal; belum dimanfaatkannya hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

4.2. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

4.2.1 Analisis Lingkungan Strategis

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul karena kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan serta acaman dari luar yang tidak diantisipasi. Untuk itu, sebelum dirumuskan permasalahan pembangunan daerah, terdapat beberapa faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan tantangan) yang

perlu dikemukakan terlebih dahulu untuk dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan strategi dan kebijakan.

a. **Kekuatan**

Dengan wilayah administratif yang cukup luas, Kabupaten Supiori memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar, utamanya dalam bidang perikanan dan pariwisata. Dengan laut yang begitu luas, potensi perikanan sangat besar. Dengan keindahan alam yang begitu menakjubkan akan menjadikan Supiori menjadi kabupaten dengan potensi pengembangan wisata terkemuka di Provinsi Papua. Disamping itu, dengan adanya anggaran daerah yang relatif besar (dibandingkan dengan jumlah penduduk yang relatif kecil), ditambah dengan dana dari Otonomi Khusus, Kabupaten Supiori memiliki kekuatan yang besar untuk membangun daerah dan masyarakatnya. Komitmen Kepala Daerah yang tinggi dalam membuat Masyarakat Supiori menjadi pintar, sehat dan kenyang, merupakan suatu kekuatan tersendiri, dan akan terus menjadi patokan dan pedoman membangun Supiori.

b. **Kelemahan**

Selain kekuatan, terdapat beberapa kelemahan yang dimiliki Kabupaten Supiori, antara lain: jumlah penduduk miskin yang cukup signifikan, dan jumlah pengangguran yang cukup tinggi. Kelemahan lainnya adalah lahan dan SDM di bidang pertanian terbatas, sehingga produksi pertanian belum mampu memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduk. Di bidang infrastruktur, ketersediaan pelabuhan dan dermaga serta kapal pengangkut untuk mendukung konektivitas antar pulau juga sangat kurang. Di sisi yang lain kapasitas listrik yang kurang memadai. Ketersediaan air bersih juga kurang memadai. Begitu pula dengan jaringan telekomunikasi di beberapa pulau berpenghuni juga masih kurang. Kelemahan

yang masih terasa adalah masih rendahnya motivasi penduduk untuk berusaha maju dan mandiri di bidang ekonomi. Apalagi adat istiadat masih menjadi faktor penghambat masyarakat untuk keluar dari cengkeraman kemiskinan dan berusaha menjadi mandiri.

c. **Peluang**

Beberapa faktor eksternal yang memberikan peluang dalam pengembangan Kabupaten Supiori. Pertama, adanya dukungan pemerintah pusat dalam membangun Papua lewat UU Otsus. Peluang membangun Papua sangat besar. Peluang kedua adalah dukungan pemerintah pusat untuk pengembangan wilayah terluar/perbatasan semakin meningkat. Peluang ketiga, adanya permintaan pasar dalam negeri dan luar negeri terhadap produk laut seperti ikan dan rumput laut, masih tinggi. Peluang lainnya adalah kecenderungan meningkatnya jumlah wisatawan domestik dan mancanegara untuk mengunjungi obyek wisata di Indonesia, sangat signifikan meningkat dari tahun ke tahun. Kombinasi daya tarik kelauatan & perikanan dan pariwisata akan memberikan kontribusi yang sangat menjanjikan untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Peluang diatas dipermudah dengan letak Kabupaten Supiori yang berdekatan dengan Kabupaten Biak, dimana sarana dan prasarana di Kabupaten Biak dapat dimanfaatkan seperti pelabuhan udara dan laut.

d. **Ancaman/Tantangan**

Beberapa faktor eksternal yang menjadi ancaman sekaligus tantangan dalam pembangunan di Kabupaten Supiori antara lain: Tantangan/ancaman **lokal** berkenaan dengan beberapa pulau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga; jarak tempuh antar kab/kota dan jarak dan waktu tempuh antar

kecamatan yang cukup jauh dan lama juga menjadi tantangan untuk penyediaan sarana dan prasarana perhubungan laut untuk mempercepat waktu tempuh. Tantangan di tingkat **regional** dapat dilihat dalam RPJMD Provinsi Papua tahun 2013-2018, dimana isu strategis pembangunan tingkat regional Provinsi Papua meliputi: Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua sebagai yang terendah di Indonesia; masih rendahnya akses masyarakat asli Papua pada pendidikan dasar dan menengah termasuk non-formal akibat rendahnya ketersediaan layanan pendidikan untuk masyarakat di daerah terpencil, pendekatan yang tidak sesuai dengan kondisi geografis dan pola permukiman serta budaya masyarakat setempat; belum tersedianya system jaminan pemenuhan biaya pendidikan gratis (operasional dan personal) dari jenjang pendidikan dasar sampai menengah khususnya bagi orang Papua Asli sesuai mandat Undang-Undang Otsus, menyebabkan tingginya biaya pendidikan yang harus ditanggung masyarakat; masih rendahnya akses masyarakat pada pemenuhan kesehatan dasar akibat rendahnya ketersediaan sarana kesehatan, ketersediaan obat-obatan secara merata, serta tingginya biaya kesehatan akibat belum meratanya distribusi jaminan kesehatan masyarakat; masih tingginya kematian ibu, kematian bayi yang baru lahir dan balita, angka balita kurang gizi, serta penyakit endemis malaria dan menular berbahaya; masih rendahnya ketersediaan perumahan layak huni dan terjangkau dengan sanitasi lingkungan dan air bersih yang bermutu dan ketersediaan listrik yang merata; ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat perkotaan dan pedesaan karena pemberdayaan ekonomi yang belum sepenuhnya bertumpu pada kekuatan ekonomi kerakyatan dalam memastikan adanya mata pencaharian yang menyebabkan rendahnya nilai tambah dan produktivitas di wilayah pedesaan; masih rendahnya angka kemandirian fiskal

akibat belum optimalnya pemanfaatan sumber pendapatan asli daerah dari produk unggulan daerah non migas diantaranya pertanian, perikanan, kehutanan pariwisata serta sumber pendapatan un-convensional lainnya; belanja pemerintah cenderung tidak efisien sehingga menciptakan kesenjangan social dan politik ekonomi yang menempatkan masyarakat pada posisi absolut konsumtif; disharmoni hubungan pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota akibat miss-management dalam penetapan orientasi dan strategi pembangunan sehingga meninggalkan peran kabupaten/kota sebagai jenjang pemerintahan dengan leluasa tersendiri; terabaikannya peran masyarakat Adat termasuk perempuan Papua yang secara keterwakilan oleh MRP (Majelis Rakyat Papua) selaku mitra utama pemerintah sehingga proses pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan banyak yang bertentangan dengan prinsip dasar dan hak dasar masyarakat adat; tidak konsistennya penyelenggaraan pembangunan papua karena belum tersedia masterplan pembangunan (RPJP) sebagai kesepakatan warga menuju peradaban baru yang dicita-citakan bersama; pembangunan infrastruktur strategis yang tidak berkesinambungan sehingga koneksitas antar daerah masih terhambat; masih adanya tuntutan dari kelompok masyarakat Papua untuk memisahkan diri dari NKRI karena tidak terlaksananya rekonsiliasi akibat perbedaan pemahaman sejarah Bangsa dan ketidak puasan pada kebijakan publik yang belum menjawab permasalahan mendasar pembangunan; pengendalian dan pengurangan aksi korupsi, kolusi dan nepotisme belum berjalan dengan baik; tidak jelasnya mind set dan culture set birokrasi pemerintah daerah yang berdampak pada rendahnya produktivitas dan kualitas pelayanan public dalam pencapaian prioritas pembangunan; penataan dan pemanfaatan ruang bagi pembangunan tidak

terlaksana dengan baik karena kurangnya koordinasi antar provinsi dan kabupaten/kotamaupun stakeholder lainnya; distribusi pembiayaan pembangunan era ekonomi khusus yang belum proporsional antara provinsi dengan kabupaten/kota dalam penyediaan layanan yang lebih kontekstual; belum optimalnya pengembangan potensi olahraga prestasi dan perlindungan nyata atas kekayaan intelektual serta kebudayaan luhur asli papua termasuk penialaian atas sumberdaya hayati dan plasma nutfah asli papua berdasarkan penelitian dan pengembangan secara berkelanjutan dan memastikan penguatan akar budaya papua dalam menghadapi gempuran modernisasi; rendahnya kepercayaan investor karena belum adanya upaya konstruktif dalam penegakan hukum, pengembangan sistim informasi pembangunan daerah yang mendukung pertumbuhan investasi daerah yang berorientasi pada pendapatan asli daerah. Di tingkat **nasional** juga terdapat tantangan berupa tuntutan untuk mengikuti dinamika pembangunan nasional sebagaimana diungkapkan dalam RPJPN dan RPJMN. Kabupaten Supiori harus memperhatikan visi RPJM Nasional tahun 2015-2019 yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Rakyat”**, termasuk misi yaitu: Mewujudkan kemandirian nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; mewujudkan masyarakat maju, kesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum; mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; mewujudkan bangsa yang berdaya saing; mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim, mandiri, maju, kuat dan berlandaskan kepentingan nasional; mewujudkan

masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Untuk mencapai visi misi tersebut, diwujudkan dalam sebilan agenda prioritas yang disebut **NAWA CITA**, yaitu: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam keanga negara kesatua; memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system dan penekan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; meningkatkan kualitas hidup manusia dna masyarkat Indonesia; meningkatkan produktivitas rkayat dan daya saing di pasar internasional sehingga basa indoneisa bisa maju dan bangkit bersama bangsa asia lainnya; mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; melakukan revolusi karakter bangsa, serta memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi social Indonesia.

Tantangan **internasional** datang dari pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadikan persaingan produk dengan negara lain semakin besar khususnya tantangan dalam peningkatan standarisasi, mutu produk-produk daerah dan menjadi acaman pula terhadap kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. Di samping itu adanya tuntutan yang cukup berat di masa mendatang berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang mengajukan 17 tujuan spesifik dengan 169 target yang saling berkaitan, seperti mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan gizi dan memajukan pertanian berkelanjutan; memastikan hidup sehat dan memajukan kesejahteraan bagi semua orang di semua usia; memastikan kualitas pendidikan yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan



belajar seumur hidup bagi semua; mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan; memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi bagi yang berkelanjutan bagi semua; memastikan akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua; mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, kesempatan kerja yang penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua; membangun infrastruktur yang tangguh, menggalakan industrialisasi yang berkelanjutan dan inklusif dan mengembangkan inovasi; mengurangi ketimpangan di dalam dan diantara negara-negara; membuat kota dan permukiman manusia menjadi menjadi inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan; memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan; mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan dan iklim dan dampak-dampaknya; menghemat dan menjaga kesinambungan dalam menggunakan samudra, laut dan sumber daya untuk pembangunan yang berkelanjutan; melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, mengelolah hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan degradasi tanah cadangan serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati; mendorong kehidupan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

4.2.3. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Supiori.

Berdasarkan permasalahan dan analisis lingkungan strategis pembangunan tersebut di atas, maka isu-isu strategis pembangunan Kabupaten yang akan ditangani dalam jangka waktu lima tahun kedepan meliputi:

1. **Kemiskinan dan Pengganguran masih relatif tinggi**

Tingkat kemiskinan masih belum ada penurunan dari tahun 2011 s/d 2015. Tingginya tingkat pengangguran terbuka (19,24% tahun 2014) yang didominasi lulusan SLTA ke bawah dan belum memadainya kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja terutama penduduk asli Kabupaten Supiori. Ketergantungan yang besar dari subsidi pemerintah akan menghambat visi Kepala Daerah yaitu Kemandirian. Kondisi ketergantungan dari waktu ke waktu terhadap subsidi ini akan menghambat upaya peningkatan daya beli masyarakat.

2. **Kualitas dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Masih Belum Memadai**

Sarana dan fasilitas serta kualitas pendidikan harus diakui masih belum memadai. Hal ini dapat dilihat dari masih terdapat sarana dan prasarana sekolah yang berada dalam kondisi rusak dan kurang memadai, masih rendahnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, masih rendahnya kualitas pendidikan non formal dan informal. Sampai sekarang belum dikembangkan bidang pendidikan kejuruan yang terkait dengan keunggulan potensi daerah, khususnya di bidang kelautan perikanan, pariwisata dan pertanian. Proporsi murid dan siswa yang tidak melanjutkan ke sekolah lanjutan menunjukkan motivasi untuk sekolah masih rendah. Kondisi ini akan sangat menghambat meningkatnya indeks pendidikan.

3. **Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan**

Masyarakat Belum Optimal

Derajat kesehatan belum optimal. Sarana dan fasilitas kesehatan masih belum memadai kualitasnya, dan pelayanan kesehatan yang baik belum merata atau menjangkau ke seluruh wilayah Kabupaten Supiori, terutama di pulau-pulau. Angka harapan hidup dan kematian bayi serta kematian ibu di kabupaten tersebut menunjukkan derajat kesehatan masyarakat masih harus terus diperhatikan untuk meningkatkan indeks kesehatan.

4. **Pengembangan Potensi Perikanan Belum Optimal**

Sebagian besar wilayah kabupaten Supiori merupakan kawasan lautan yang mempunyai potensi perikanan sangat tinggi masih belum dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian lokal. Pengembangan masih sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan lokal dan belum berorientasi ekspor.

5. **Pengembangan Pariwisata Belum Optimal**

Potensi pariwisata baik di darat maupun di laut di Kabupaten Supiori cukup besar yang belum dikembangkan. Keindahan alam di berbagai pulau dan dalam laut belum diolah untuk meningkatkan perekonomian daerah. Promosi akan potensi dan keindahan berbagai sumber dan obyek pariwisata belum memadai.

6. **Pengembangan Wilayah Perbatasan Belum Optimal**

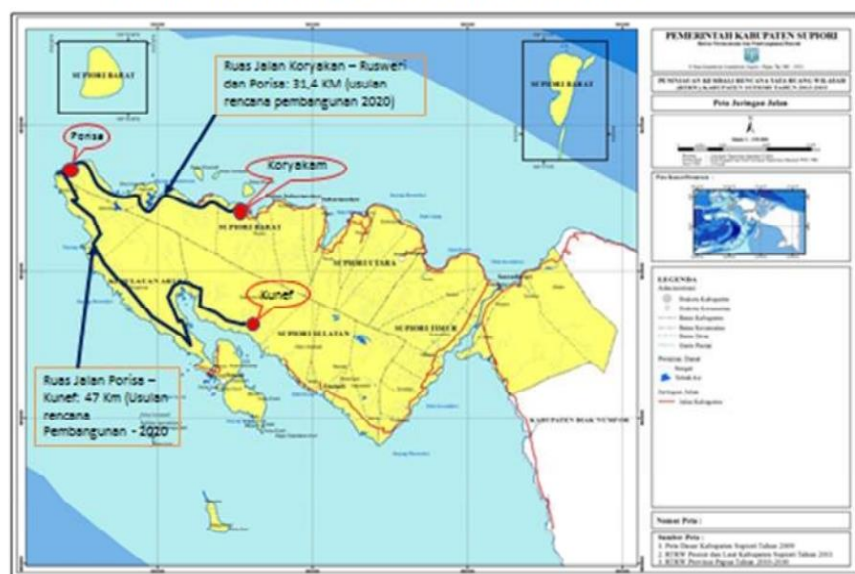
Kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Tingkat pengembangan wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga belum optimal. Beberapa hal krusial yang perlu menjadi perhatian adalah kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan, serta sarana

perhubungan, pendidikan, kesehatan, perekonomian, komunikasi, air bersih, irigasi, dan ketenagalistrikan.

7. Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Infrastruktur serta Konektivitas Darat dan antar Pulau Belum Memadai

Masih banyaknya sarana dan prasarana infrastuktur dan konektivitas darat dan antar pulau; seperti issue pemindahan status jalan guna aksesibilitas, energi listrik dan telekomunikasi belum memadai, yang perlu terus dikembangkan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor terkait dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

PETA JARINGAN JALAN DIKABUPATEN SUPIORI



Dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Supiori yang terdiri dalam 5 Distrik dan 38 Kampung, guna mempercepat pemerataan pembangunan sampai di wilayah-wilayah distrik dan kampung maka perlu dibangun infrastruktur jalan dan jembatan yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendidtribusikan potensi alamnya baik hasil laut, pertanian dan juga kebutuhan masyarakat lainnya dalam memanfaatkan jalan dan jembatan sebagai media untuk memudahkan

kebutuhan dari pemindahan barang maupun jasa orang masih terdapat sekian ruan jalan sepanjang 78,4 Km yang berada di beberapa wilayah yang perlu dibangun sehingga dapat menghubungkan wilayah-wilayah lainnya di Kabupaten Supiori yaitu di wilayah Distrik Supiori Barat, wilayah di Distrik Kepulauan Aruri yang nanti dapat berkeoneksi dengan pembangun infrastruktur di wilayah Distrik Supiori Selatan sehingga dapat terkoneksi maka memberikan kemudahan dalam akses bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Supiori.

Dengan adanya jalan dan jembatan dalam kondisi baik dalam memudahkan akses dari wilayah Distrik Supiori Barat dan Kepulauan Aruri ke Ibu Kota Kabupaten yang lebih besar lagi sehingga dapat menghubungkan pusat pusat produksi dengan daerah pemasaran dan untuk mewujudkan keserasian pembangunan antar wilayah Utara, Barat, Selatan dan Kepulauan Aruri di Kabupaten Supiori yang sama, merata, dan seimbang serta untuk membuka akses daerah-daerah yang terisolir.

8. Kualitas sumber daya aparatur dan tata kelola pemerintahan belum diperhatikan secara memadai.

Kualitas sumber daya aparatur masih harus terus ditingkatkan untuk mempercepat kinerja pembangunan dan pelayanan. Tata kelola pemerintahan dalam setiap SKPD masih belum diterapkan sesuai prinsip-prinsip *good governance*.

9. Budaya lokal dan peran perempuan belum dikembangkan secara optimal

Belum diterapkannya secara optimal frase *kovawes kuker airama* (nilai-nilai luhur budaya local) dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi dan adat istiadat yang mendorong percepatan pembangunan belum dimanfaatkan secara optimal. Peran dan



kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat masih belum diperhatikan secara memadai.